

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya, transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada instansi tersebut. Temuan ini mengimplikasikan bahwa penguatan aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja organisasi sektor publik di Kabupaten Sampang.

Katakunci: Akuntabilitas; Kinerja Pemerintah Daerah; Pengelolaan Keuangan; Transparansi; PLS-SEM.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Putri Anggraini, N., & Syaiful Akbar, F. (2026). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sampang (Studi Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang). *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(2), 4014-4030. <https://doi.org/10.63822/9c1j1c46>

PENDAHULUAN

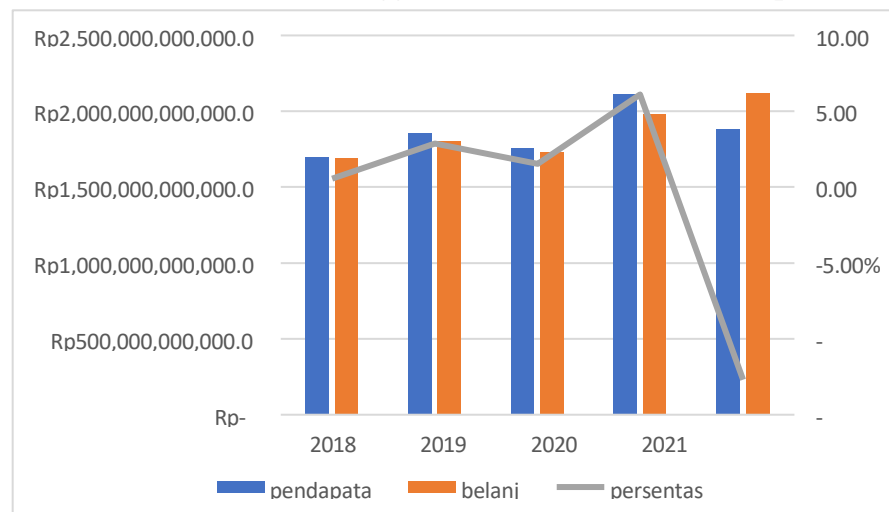
Era reformasi menuntut pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kinerja yang transparan dan akuntabel guna memenuhi kepuasan publik. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, otonomi daerah memberikan kewenangan besar bagi daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Namun, pengelolaan ini harus diiringi dengan sistem pengukuran kinerja yang baik guna mewujudkan Good Governance.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio*, dan rasio pertumbuhan. Salah satu alat yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan (Jatmika, 2021).

Di Kabupaten Sampang, fenomena fluktuasi penyerapan anggaran pada BPPKAD periode 2018-2022 menunjukkan adanya ketidakstabilan ekonomi, dimana terjadi surplus pada 2018-2021 namun mengalami defisit pada tahun 2022. Hal ini memicu pertanyaan mengenai sejauh mana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan telah diimplementasikan dan dampaknya terhadap kinerja instansi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Sampang.

Berikut merupakan data realisasi anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang periode tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Gambar 1. Data Realisasi Anggaran Belanja BPPKAD Kabupaten Sampang.



Sumber : Data Diolah Peneliti

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memegang peranan krusial sebagai instrumen pendanaan bagi pemerintah daerah dalam mengeksekusi berbagai program dan proyek strategis. Cakupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi sektor pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah, yang sekaligus berfungsi sebagai acuan pemerintah dalam menetapkan target kontribusi pajak dari masyarakat, lalu sebagai sarana untuk mengontrol dan mengawasi perkembangan tiap daerah pada setiap periode anggaran, sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran pada periode berikutnya, dan lain-lain. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah seringkali menghadapi kendala. Fenomena di Kabupaten Sampang, khususnya pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), menunjukkan adanya tantangan dalam sinkronisasi antara perencanaan dan realisasi anggaran. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2018-2022, terjadi fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, Kabupaten Sampang mencatatkan belanja yang lebih tinggi daripada pendapatan (defisit), yang memicu diskusi mengenai optimalisasi tata kelola keuangan daerah.

Secara umum surplus anggaran dianggap baik karena pemerintah memiliki sisa uang pendapatan yang dapat diinvestasikan atau dibelanjakan untuk membayar utang, hal tersebut tergantung pada seberapa bijak pemerintah membelanjakan uangnya. Namun pada tahun 2022 menunjukkan bahwa presentase antara realisasi dengan pendapatan yang dianggarkan mengalami defisit anggaran. Dimana defisit anggaran yang menunjukkan kondisi anggaran ketika jumlah belanja lebih besar dari pendapatan yang diperoleh. Situasi ini sering terjadi akibat berbagai faktor seperti pengurangan pendapatan negara, peningkatan belanja pemerintah, serta kebijakan fiskal yang tidak optimal.

Penelitian ini menggunakan lima penelitian terdahulu yang mengkaji pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah sebagai bahan referensi dan perbandingan. Kelima penelitian tersebut sama-sama menerapkan metode kuantitatif melalui pendekatan survei dengan menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data primer dari para pegawai negeri yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah, seperti pejabat eselon, kepala dinas, sekretaris, dan staf bagian akuntansi.

Meskipun memiliki kemiripan dalam metodologi dan jenis data yang digunakan, hasil akhir dari kelima kajian ini menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Penelitian oleh Auditya et al. (2021) di Provinsi Bengkulu, Edowati et al. (2021) di Kabupaten Deiyai, serta Elkha et al. (2020) di Kabupaten Gresik secara konsisten menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi (serta pengendalian internal) berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah, walaupun di Bengkulu penerapannya dinilai belum optimal pada beberapa SKPD.

Senada dengan temuan tersebut, Binawati et al. (2022) di Kabupaten Magelang membuktikan bahwa variabel pengawasan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan. Sebaliknya, hasil berbeda ditemukan oleh Amali et al. (2021) di Kabupaten Kebumen, yang menunjukkan bahwa pengujian terhadap variabel pengawasan, akuntabilitas,

dan transparansi pengelolaan keuangan daerah justru tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya membedah secara empiris sejauh mana kedua faktor tersebut berkontribusi terhadap pencapaian kinerja di instansi vital seperti BPPKAD Kabupaten Sampang.

KAJIAN TEORITIS

Teori Agensi

Menurut Zulfajrin, dkk. (2022), teori agensi mendeskripsikan hubungan kerja sama di mana pemerintah bertindak sebagai agent (pengelola) yang diberi wewenang oleh publik selaku principal untuk mengambil keputusan demi kepentingan terbaik masyarakat. Fokus utama dari teori ini adalah menyusun kontrak yang efisien guna mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Kontrak yang efisien tersebut harus memenuhi dua syarat utama, yaitu adanya informasi yang simetris agar tidak ada hal yang disembunyikan, serta kepastian imbal jasa yang tinggi dengan risiko yang kecil bagi agent. Dalam konteks penelitian, hubungan ini tercermin dari kewajiban pemerintah untuk menerapkan strategi pelayanan publik yang optimal, di mana hasil kerjanya dapat dinilai secara langsung oleh publik melalui Laporan Realisasi Anggaran.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan pengelolaan sumber daya serta kebijakan suatu entitas kepada pihak yang berkepentingan secara periodik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan arahnya, akuntabilitas dibedakan menjadi akuntabilitas vertikal kepada otoritas yang lebih tinggi dan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat atau lembaga setara, yang mana menurut Risakotta (2024) juga terbagi menjadi akuntabilitas internal (pegawai, pejabat, legislatif) serta eksternal (pembayar pajak, media, investor).

Transparansi

Menurut Sari et al. (2021), tujuan utama transparansi adalah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government), terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah yang menuntut manajemen keuangan sehat. Kehadiran transparansi sangat membantu penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang objektif dan berkualitas, sekaligus mengatasi masalah ketidakjelasan pedoman yang selama ini membingungkan pemerintah daerah. Makna dari transparansi ini berfokus pada dua hal, yaitu sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat serta upaya meningkatkan manajemen pengelolaan demi menekan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, UU No. 23 Tahun 2014, serta pemikiran Sari et al. (2021), keuangan daerah secara umum didefinisikan sebagai seluruh hak dan kewajiban daerah

Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sampang (Studi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang)

(Angraini, et al.)

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai atau diukur dengan uang. Cakupan ini juga meliputi segala bentuk kekayaan, uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berkaitan erat dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses ini harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan menjunjung asas keadilan, kepatutan, manfaat masyarakat, serta ketaatan pada regulasi. Hasil pengelolaan ini diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pengelolaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendistribusikan sumber daya regional, meningkatkan efektivitas keuangan, serta membuka lapangan kerja demi mengurangi pengangguran. Adapun ruang lingkupnya mencakup hak memungut pajak/retribusi dan melakukan pinjaman, kewajiban menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membayar pihak ketiga, penerimaan dan pengeluaran daerah, serta pengelolaan kekayaan daerah maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Konsep Kinerja

Kinerja secara umum diartikan sebagai kemampuan, prestasi, atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu maupun organisasi dalam melaksanakan pekerjaan pada periode tertentu. Menurut Bastian (2010), kinerja merupakan gambaran pencapaian program untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis, sementara Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 menetapkan kinerja sebagai keluaran atau hasil kegiatan yang terukur secara kuantitas dan kualitas sehubungan dengan penggunaan anggaran. Secara spesifik, penilaian kinerja bertujuan untuk meningkatkan saling pengertian antar-karyawan mengenai standar kerja, memberikan pengakuan guna memotivasi prestasi, menyediakan ruang diskusi bagi aspirasi karier, merumuskan kembali sasaran masa depan, serta mengevaluasi rencana pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Agar penilaian tersebut bermanfaat, Barasa, dkk. (2021) merumuskan empat karakteristik utama yang harus dimiliki oleh kriteria kinerja yang baik. Pertama, kriteria harus dapat diukur secara andal, yang mencakup aspek stabilitas (hasil serupa pada waktu berbeda) dan konsistensi (hasil sama dengan metode atau penilai berbeda). Kedua, kriteria harus mampu membedakan individu berdasarkan kinerjanya secara adil guna menentukan kompensasi, promosi, atau kebutuhan pelatihan. Ketiga, kriteria wajib bersifat sensitif terhadap tindakan pemegang jabatan, artinya indikator yang dinilai harus berada di bawah kendali dan kebijakan individu tersebut. Terakhir, kriteria kinerja harus dapat diterima oleh individu yang dinilai agar mereka merasa proses pengukuran dilakukan secara adil, benar, dan representatif terhadap kontribusi mereka.

Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan berbagai indikator, seperti: (a) Pemberdayaan perempuan dan masyarakat, (b) Lingkungan hidup, (c) Perhubungan, (d) Perencanaan pembangunan daerah, (e) Pertanahan dan tata ruang, (f) Pekerjaan umum, perumahan, dan ESDM, (g) Kesehatan, (h) Pendidikan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Herindraningrum & Yuhertiana (2021), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja keuangan kepada publik, yang setiap tahunnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dinilai kewajaran dan kualitas penyajiannya melalui pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan yang berkualitas harus disajikan secara andal—artinya jujur, dapat diverifikasi, serta bebas dari kesalahan material dan pengertian yang menyesatkan—di mana proses penyusunannya memerlukan kompetensi dari para pengelola keuangan daerah itu sendiri.

Rasio Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Awani & Hariani (2021), analisis rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan metode perbandingan antarpos dalam laporan keuangan, baik dalam satu periode maupun antarperiode, untuk melihat kecenderungan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja ini menggunakan empat jenis rasio utama, yaitu Rasio Kemandirian Daerah yang mengukur tingkat kemandirian fiskal dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan transfer dan pinjaman; Rasio Efektivitas Daerah yang menilai kemampuan memobilisasi penerimaan dengan membandingkan realisasi PAD terhadap targetnya; Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yang memperlihatkan kontribusi PAD terhadap total seluruh penerimaan daerah; serta Rasio Keserasian Belanja yang digunakan untuk mengetahui tingkat keseimbangan alokasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas merupakan kemauan memberikan penjelasan dan justifikasi keinginan dan perbuatan kepada yang berkepentingan. Akuntabilitas sendiri berkaitan erat dengan kinerja instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah. Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan cara: (1) Melakukan audit secara berkala, (2) Melaporkan hasil audit kepada publik, (3) Menyampaikan laporan keuangan yang berkualitas.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat dan DPRD. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Sehingga,

Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sampang (Studi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang)

(Anggraini, et al.)

akuntabilitas berdampak terhadap pencapaian kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian Binawati dan Badriyah pada tahun 2022 yang menghasilkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

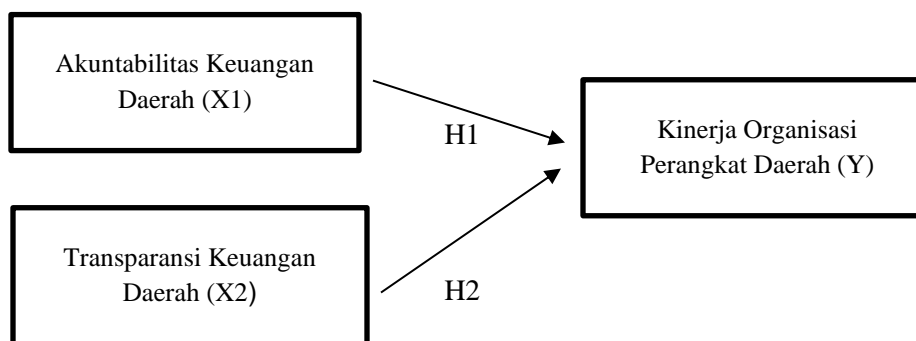
H1: Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi keuangan kepada publik. Transparansi ini bertujuan untuk: (1) Menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat, (2) Menjamin akuntabilitas pemerintah daerah, (3) Memfasilitasi pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah, (4) Menumbuhkan demokratisasi ditingkat lokal.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Berdasarkan penelitian Elkha dan Wahidahwati pada tahun 2020 menghasilkan transparansi pengelolaan keuangan daerah memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

H2: Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.



METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Adapun objek studi dari penelitian ini adalah kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 yang diperoleh melalui data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan terhadap responden yang terdiri dari pegawai atau staff dengan kriteria sampel yakni pegawai atau staff yang berkaitan dengan penganggaran dan pegawai atau staff yang sudah ASN (Aparatur

Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sampang (Studi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang)

(Angraini, et al.)

Sipil Negara. Pengukuran variabel menggunakan Skala Likert 1-5. Analisis data dilakukan melalui dua tahap utama dalam SmartPLS. Model Pengukuran (*Outer Model*) untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen, serta Model Struktural (*Inner Model*) untuk menguji hipotesis melalui nilai koefisien jalur dan signifikansi (*p-value*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini data didapatkan dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada responden, yaitu pegawai/staff Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang yang diberikan kepada responden terdiri dari 54 pertanyaan yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel, dan kinerja pemerintah daerah (Y). Pada tahun 2024 ini, tercatat sejumlah 69 pegawai/staff di kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang. Setelah dilakukannya penentuan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Maka didapat sampel yang memenuhi kriteria sejumlah 50 pegawai/staff. Penyebaran kuesioner ini dilaksanakan selama 3 hari dengan jumlah kuesioner yang disebarkan sejumlah 50 eksemplar dan jumlah kuesioner yang kembali 100% atau sejumlah 50 eksemplar.

Tabel 1 Daftar Sampel Pegawai/Staff BPPKAD Kabupaten Sampang

No.	Nama Bidang	Jumlah Penyebaran Kuesioner	Jumlah Pengembalian Kuesioner	Persentase
1.	Bidang Pengelolaan Aset	12	12	100%
2.	Bidang Pendapatan	13	13	100%
3.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	7	7	100%
4.	Bidang Anggaran	7	7	100%
5.	Bidang Perbendaharaan	11	11	100%
	Total	50	50	100%

Sumber : Data Diolah Peneliti

Uji Hipotesis

Pada penelitian ini peneliti menggunakan bantuan SmartPLS 4.1 dalam menganalisis dan mengelola data. Terdapat tiga tahapan yang dilakukan peneliti dalam menganalisis dan mengelola data, yaitu: (1) Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*), (2) Analisis Model Struktural (*Inner Model*), (3) Uji Hipotesis.

Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sampang (Studi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang)

(Angraini, et al.)

Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Tujuan dilakukannya pengujian model pengukuran atau *outer model* adalah untuk mengukur validitas dan reliabilitas dari indikator-indikator yang membentuk konstruk laten. Peneliti pada pengujian *outer model* ini menggunakan tiga kriteria penilaian, yaitu *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*. Validitas dari sebuah model akan dinilai menggunakan indikator *reflective* melalui konvergen (*convergent validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*). Sedangkan reliabilitas model akan dinilai melalui *composite reliability* dan *cronbach alpha*. Berikut ini merupakan hasil analisis *outer model* yang didapat dari pengujian menggunakan software SmartPLS 4.1:

Uji Validitas

a. Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Pada pengujian validitas konvergen menggunakan prinsip bahwa manifest variabel dari suatu konstruk harus mempunyai korelasi yang tinggi. Penilaian validitas konvergen dilakukan berdasarkan nilai-nilai *loading factor* dari indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut. Nilai dari *outer loading* harus lebih besar dari 0,70 untuk penelitian yang bersifat *confirmatory*.

Tabel 2 Nilai Convergent Validity

	Akuntabilitas	Transparansi	Kinerja Pemerintah Daerah
	X1	X2	Y
X1.1	0.933		
X1.2	0.841		
X1.3	0.712		
X1.4	0.701		
X1.5	0.863		
X1.6	0.932		
X1.7	0.923		
X1.8	0.953		
X1.9	0.741		
X1.10	0.961		
X2.1		0.817	
X2.2		0.801	
X2.3		0.826	
X2.4		0.733	
X2.5		0.732	
X2.6		0.725	
X2.7		0.731	
X2.8		0.761	
X2.9		0.798	
X2.10		0.936	

Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sampang (Studi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang)
 (Angraini, et al.)

X2.11		0.946	
X2.12		0.916	
Y.1			0.843
Y.2			0.836
Y.3			0.660
Y.4			0.865
Y.5			0.847
Y.6			0.789
Y.7			0.786
Y.8			0.829
Y.9			0.739
Y.10			0.713
Y.11			0.860
Y.12			0.780
Y.13			0.804
Y.14			0.874
Y.15			0.819
Y.16			0.848
Y.17			0.839
Y.18			0.837
Y.19			0.873
Y.20			0.781
Y.21			0.757
Y.22			0.761
Y.23			0.824
Y.24			0.777
Y.25			0.774
Y.26			0.805
Y.27			0.758
Y.28			0.846
Y.29			0.823
Y.30			0.818
Y.31			0.737
Y.32			0.807

Tabel diatas menyatakan bahwa nilai validitas konvergen (*convergent validity*) dari semua variabel-variabel pada penelitian ini lebih besar dari 0,70. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua data dari penelitian ini valid dan memenuhi standar *loading factor* yang telah ditentukan.

b. Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sampang (Studi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang)

(Angraini, et al.)

Pada uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai loading korelasi indikator suatu konstruk dengan konstruk lainnya. Suatu konstruk dikatakan memiliki *discriminant validity* tinggi dan layak diteliti apabila korelasi indikator konstruk lebih tinggi dibandingkan konstruk lainnya. Pada penelitian ini diperoleh hasil evaluasi *discriminant validity* sebagai berikut:

Table 3 Nilai Discriminant Validity

	Akuntabilitas	Transparansi	Kinerja Pemerintah Daerah
	X1	X2	Y
X1.1	0.933	0.051	0.435
X1.2	0.841	0.128	0.390
X1.3	0.712	-0.226	0.572
X1.4	0.701	-0.116	0.275
X1.5	0.863	0.056	0.385
X1.6	0.932	0.177	0.338
X1.7	0.923	0.099	0.393
X1.8	0.953	0.142	0.387
X1.9	0.741	-0.125	0.232
X1.10	0.961	0.099	0.385
X2.1	0.239	0.817	-0.120
X2.2	0.188	0.801	-0.210
X2.3	0.097	0.826	-0.158
X2.4	0.209	0.733	-0.083
X2.5	0.014	0.732	-0.128
X2.6	0.029	0.725	-0.169
X2.7	0.010	0.731	-0.198
X2.8	0.005	0.761	-0.100
X2.9	0.078	0.798	-0.118
X2.10	-0.054	0.936	-0.510
X2.11	-0.000	0.946	-0.408
X2.12	-0.056	0.916	-0.457
Y.1	0.411	-0.115	0.843
Y.2	0.520	-0.095	0.836
Y.3	0.419	-0.136	0.821
Y.4	0.462	-0.096	0.865
Y.5	0.382	-0.318	0.847
Y.6	0.369	-0.148	0.789
Y.7	0.312	-0.362	0.786
Y.8	0.409	-0.241	0.829
Y.9	0.395	-0.245	0.739
Y.10	0.387	-0.364	0.713
Y.11	0.422	-0.095	0.860
Y.12	0.477	-0.319	0.780
Y.13	0.306	-0.510	0.804
Y.14	0.441	-0.328	0.874

Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sampang (Studi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang)
 (Angraini, et al.)

Y.15	0.326	-0.252	0.819
Y.16	0.341	-0.223	0.848
Y.17	0.274	-0.413	0.839
Y.18	0.394	-0.201	0.837
Y.19	0.397	-0.262	0.873
Y.20	0.376	-0.306	0.781
Y.21	0.372	-0.354	0.757
Y.22	0.279	-0.514	0.761
Y.23	0.342	-0.263	0.824
Y.24	0.379	-0.486	0.777
Y.25	0.338	-0.521	0.774
Y.26	0.350	-0.386	0.805
Y.27	0.289	-0.505	0.758
Y.28	0.392	-0.259	0.846
Y.29	0.389	-0.233	0.823
Y.30	0.301	-0.105	0.818
Y.31	0.246	-0.195	0.737
Y.32	0.484	-0.113	0.807

Sumber : Data Diolah Peneliti

Tabel diatas menyatakan bahwa masing-masing indikator variabel pada penelitian ini memiliki nilai *cross loading* yang lebih besar dari nilai *cross loading* lainnya. Selain itu semua indikator dari masing-masing variabel dalam penelitian ini juga memiliki nilai *cross loading* yang lebih besar dari 0,70. Sehingga berdasarkan data tersebut, dapat dinyatakan bahwa model yang digunakan baik dan valid karena sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas digunakan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrument yang digunakan untuk mengukur konstruk. Metode yang digunakan untuk uji reliabilitas ada dua, yaitu: (1) *Composite reliability* dan (2) *Cronbach's alpha*. Apabila nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dari masing-masing variabel menunjukkan nilai >0,7 maka variabel tersebut dikatakan reliabel dan bisa dipercaya.

Tabel diatas menyatakan bahwa nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dari masing-masing variabel penelitian memiliki nilai lebih dari 0,70. Sehingga semua variabel menunjukkan bahwa hasil dari *outer model* konstruk *reflective* sudah reliabel karena sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Tabel 4 Nilai Uji Reliabilitas

	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
X1	0.966	0.960
X2	0.959	0.959

Y	0.984	0.983
---	-------	-------

Sumber : Data Diolah Peneliti

Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Analisis model struktural atau *inner model* akan digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel konstruk atau laten yang berdasarkan pada *substantive theory* akan diukur dengan nilai koefisien determinasi dan *predictive relevance*.

Koefisien Determinasi (*R Square* atau R^2)

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk menentukan dan menilai kekuatan prediksi dari *inner model*. Pada penelitian ini diperoleh hasil untuk nilai koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 5 Nilai Koefisien Determinasi

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Y	0.362	0.334

Sumber : Data Diolah Peneliti

Tabel diatas menunjukkan nilai R Square variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) sebesar 0,362. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Kinerja Pemerintah Daerah dipengaruhi 36,2% oleh variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X1), dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X2). Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Predictive Relevance (*Q Square* atau Q^2)

Predictive relevance digunakan untuk mengukur baik atau buruknya nilai observasi yang dihasilkan dan juga mengukur estimasi parameternya dalam sebuah *inner model*. Pada penelitian ini diperoleh hasil untuk nilai *predictive relevance* sebagai berikut:

Tabel 6 Nilai Predictive Relevance

	<i>Q Square</i>
Y	0.365

Sumber : Data Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel kinerja pemerintah daerah (Y) memiliki nilai Q-Square sebesar 0,365 yang berarti bahwa variabel kinerja pemerintah daerah memiliki *predictive relevance* karena telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, yaitu $Q^2 > 0$.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengarahkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kriteria yang ditetapkan nilai probabilitas adalah nilai p -value dengan alpha 5% atau p -value $< 0,05$. Sehingga, jika p -value $< 0,05$ maka hipotesis dapat diterima. Jika p -value $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Pada penelitian ini diperoleh hasil untuk uji hipotesis sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Hipotesis

	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standart Deviation</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Value</i>
X1-Y	0.476	0.485	0.099	4.825	0.000
X2-Y	-0.381	-0.365	0.277	1.680	0.093

Sumber : Data Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel diatas nilai p -value dari variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan (X1) menunjukkan hasil dibawah 0,05 ($< 0,05$) yaitu 0,000 sedangkan nilai p -value dari variabel transparansi pengelolaan keuangan (X2) menunjukkan hasil diatas 0,05 ($> 0,05$) yaitu 0,093. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini hanya variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan (X1) yang dapat diterima atau memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel kinerja organisasi perangkat pemerintah daerah (Y).

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t -statistics terbesar ditunjukkan oleh pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan (X1) terhadap kinerja organisasi perangkat pemerintah daerah (Y) dengan nilai t -statistics sebesar 4,825. Kemudian, nilai t -statistics pengaruh transparansi pengelolaan keuangan (X2) terhadap kinerja organisasi perangkat pemerintah daerah (Y) yaitu 1,680.

Hasil t -statistics dari seluruh variabel hanya variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan (X1) saja yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dikarenakan nilai t -statistics lebih besar dari 1,96 ($> 1,96$). Semakin besar nilai t -statistics pada suatu variabel independen terhadap dependen, maka semakin kuat juga pengaruh dari variabel independen terhadap variabel independen tersebut.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi di BPPKAD Kabupaten Sampang, di mana penerapan prinsip akuntabilitas yang baik terbukti mampu mengoptimalkan distribusi sumber daya dan pencapaian tujuan organisasi. Hasil ini sejalan dengan teori good governance dan didukung oleh temuan empiris yang menempatkan akuntabilitas sebagai indikator utama keberhasilan kinerja pemerintah.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi karena nilai signifikansinya melampaui ambang batas yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi publik di BPPKAD

Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sampang (Studi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang)

(Anggraini, et al.)

Kabupaten Sampang belum berdampak langsung pada efektivitas kinerja, yang kemungkinan disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat dalam mengolah data, penerapan transparansi yang masih bersifat formalitas administratif, serta dominasi faktor akuntabilitas sebagai penentu kualitas kinerja yang lebih kuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang, maka didapatkan beberapa pernyataan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi perangkat pemerintah daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang, dengan demikian H1 dapat diterima.
2. Transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi perangkat pemerintah daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang, dengan demikian H2 tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya salah satu hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini dapat diterima. Pernyataan-pernyataan tersebut juga telah menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dijelaskan mengenai “Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Studi Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Sampang”, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah disarankan untuk terus meningkatkan prinsip akuntabilitas, dan memperbaiki kualitas implementasi transparansi
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang dianggap mempengaruhi pelaksanaan pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah suatu daerah untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83–93. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1723>

Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sampang (Studi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang)

(Angraini, et al.)

- Amali, M. N., & Suwandi, E. D. (2021). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (Jimmba)*, 3(6), 1125-1138.
- Ariadi, W., & Jatmika, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Coved- 19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 11–15. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.63>
- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2021). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21–42. <https://doi.org/10.33369/fairness.v3i1.15274>
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.15>
- Barasa, L., Togatorop, A. L., & Szeze, M. (2021). Pengaruh Perilaku Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Sumberbumi Global Niaga. *Meteor STIP Marunda*, 14(2), 100-129.
- Bastian, Indra, (2010). Akuntansi Sektor Publik. Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 32-49.
- Edowati, m., Abubakar, H., & Said M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87-96
- Elkha, F., & Wahidahwati, W. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 9(3)
- Herindraningrum, F.F., & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di indonesia: Literature review. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 12(2), 157-171.
- Indonesia, R. (2003). Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Risakotta, K. A. (2024). AKUNTABILITAS INTERNAL, EKSTERNAL, DAN KINERJA PEGAWAI. CV. AZKA PUSTAKA.
- Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September*, 408–425
- Zulfajrin, Z., Abdullah, M. W., & Asyifa, Z. (2022). Teori Agensi Islam Sebagai Lokomotif Moral *Hazard Dan Adverse Selection*. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 120-131.
- Zulkarnain, Z. I., & Haryati, T. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 22(1), 27-37.
- II, B. 2.1 Pengertian Kinerja. Dirga Pratama, 13.